

LAMPIRAN :

TINDAK LANJUT HASIL DESK EVALUATION CALON SATUAN KERJA WBK/WBBM TAHUN 2020

SATKER : BPS PROVINSI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PENILAI : 1. SULISTIYOWATI (DALNIS)

2. ANA WIDIASTUTI (KETUA TIM)

3. ARIF SANTOSO (ANGGOTA TIM)

KRITERIA PENILAIAN			DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
A.	PROSES (60)			
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)			
	1	Tim Kerja (1)		
	a.	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	-	-
	b.	Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Belum terdapat prosedur/mechanisme penentuan anggota tim. Di dalam notulen rapat yang dilampirkan tidak membahas terkait pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas. Rapat tidak menunjukkan pembentukan tim, rapat diadakan pada tanggal 25 Februari 2019, sedangkan SK tim telah ada pada tanggal 11 Februari 2019.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) laporan pelaksanaan rapat pembentukan Tim Kerja; (ii) mekanisme yang menjelaskan tata cara pemilihan anggota Tim (iii) Kertas kerja penentuan anggota Tim Kerja
	2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)		
	a.	Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1. Dokumen pembangunan ZI belum menerangkan mulai dari perencanaan, pembangunan, sampai pengembangannya. 2. Masih terdapat bagian yang menyebutkan "BPS Sulbar". 3. Rencana kerja belum disahkan oleh kepala satker.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi rapat penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI; (ii) Dokumen perencanaan, pembangunan, dan pengembangan ZI disusun dalam bentuk buku laporan tidak hanya tabel saja; (iii) Dokumen rencana aksi yang memuat target prioritas
	b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Bukti tidak relevan, dokumen yang dilampirkan berupa CKP (Capaian Kinerja Pegawai) Tahun 2019. Belum ada dokumen pembangunan yang berisi target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Laporan pelaksanaan penyusunan target prioritas ZI; (ii) Dokumen rencana aksi yang memuat target prioritas; (iii) SK tentang rencana pembangunan ZI dan target prioritas
	c.	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Bukti yang dilampirkan belum spesifik menerangkan tentang sosialisasi pembangunan WBK/WBBM.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar berupa laporan pelaksanaan sosialisasi pembangunan WBK/WBBM.
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)		
	a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Laporan pelaksanaan pembangunan ZI masih belum menggambarkan keadaan real di BPS Kabupaten Polewali Mandar, karena laporan masih banyak menyebutkan "BPS Provinsi Sulawesi Barat". Agar BPS Kabupaten Polewali Mandar membuat laporan pelaksanaan pembangunan ZI sesuai pelaksanaan di unit kerjanya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja; (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat kegiatan; (iii) Dokumentasi pelaksanaan rencana aksi..
	b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Laporan belum menggambarkan keadaan real di BPS Kabupaten Polewali Mandar, karena laporan masih banyak menyebutkan "BPS Provinsi Sulawesi Barat". Agar BPS Kabupaten Polewali Mandar membuat laporan monitoring dan evaluasi tim internal ZI sesuai pelaksanaan di unit kerjanya.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi
	c.	Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Laporan tindak lanjut hanya untuk pemanfaatan aplikasi SIMATRIKS dan SIPEKAN.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Notulen/laporan monitoring dan evaluasi yang memuat rekomendasi; (ii) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi; (iii) Dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut.
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)		
	a.	Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Agar menambahkan bukti dukung berupa presensi kepala satker.	Bukti dukung berupa presensi kepala satker telah ditambahkan.
	b.	Sudah ditetapkan agen perubahan	SK agen perubahan untuk jabatan staf/fungsional umum belum terdapat pengesahan/tanda tangan dari kepala satker.	SK agen perubahan telah di tanda tangani oleh kepala satker.
	c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	-	-

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
			d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Belum terdapat bukti semua pegawai terlibat dalam pembangunan Zona Integritas. Bukti dukung hanya berupa matrik kegiatan pendataan dan notulen yang belum menunjukkan keterlibatan semua pegawai.	Telah terdapat dokumentasi keterlibatan semua pegawai dalam pembangunan Zona Integritas. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh semua pegawai; (ii) Tambahan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI.
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)					
		1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)		
			a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	Belum terdapat SOP di setiap seksi, hanya terdapat SOP PST dan buku pedoman pencacahan sakernas. Agar melampirkan SOP pada semua seksi di BPS Kabupaten Polewali Mandar.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar SOP Inovasi unit kerja.
			b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Bukti penerapan SOP masih kurang, hanya berupa cek list penerapan SOP di seksi IPDS. Sedangkan semua SOP di seksi IPDS tidak dilampirkan. Bukti SOP telah diterapkan, dapat berupa: (i) Memorandum pelaksanaan tugas sesuai SOP pada tiap penugasan (ii) Laporan kegiatan-kegiatan dicantumkan bahwa pelaksanaan sesuai SOP	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Memorandum pelaksanaan tugas sesuai SOP pada tiap penugasan (ii) Laporan kegiatan-kegiatan dicantumkan bahwa pelaksanaan sesuai SOP (iii) Bukti rapat evaluasi suatu kegiatan sekaligus membahas penerapan SOP-nya (disebut dalam notulen).
			c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	Belum terdapat bukti SOP telah dievaluasi, bukti SOP yang dilampirkan berupa cek list penerapan SOP. Bukti dukung SOP telah dievaluasi dapat berupa : (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi atas SOP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat, misal progres perbaikan SOP (iii) Laporan evaluasi pelaksanaan SOP, dapat dibuat secara periodik sebagai hasil pelaksanaan rapat evaluasi SOP (iv) Dokumen SOP awal dan SOP perbaikan	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi atas SOP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat, misal progres perbaikan SOP (iii) Laporan evaluasi pelaksanaan SOP, dapat dibuat secara periodik sebagai hasil pelaksanaan rapat evaluasi SOP (iv) Dokumen SOP awal dan SOP perbaikan.
		2	E-Office (2)		
			a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	Bukti dukung berupa SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) kurang relevan untuk membuktikan sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi. Bukti dukung dapat berupa aplikasi terkait pengukuran kinerja, jika tidak ada inovasi dapat menggunakan bukti penggunaan aplikasi dari pusat.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar berupa inovasi penggunaan teknologi informasi untuk sistem pengukuran kinerja.
			b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Bukti dukung berupa SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) kurang relevan untuk membuktikan operasional manajemen SDM menggunakan teknologi informasi. Bukti dukung dapat berupa aplikasi terkait operasional manajemen SDM, jika tidak ada inovasi dapat menggunakan bukti penggunaan aplikasi dari pusat.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar berupa inovasi penggunaan teknologi informasi untuk operasionalisasi manajemen SDM.
			c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Belum terdapat bukti adanya inovasi pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar berupa inovasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan kepada publik.
			d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Bukti berupa kotak aduan kurang relevan membuktikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Bukti dapat berupa : (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi penggunaan TI, misalnya undangan, daftar hadir, notulen (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal progres perbaikan TI (iii) Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI, dapat dibuat secara periodik	Belum terdapat bukti dukung monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi layanan kepada publik. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Bukti pelaksanaan rapat evaluasi penggunaan TI, misalnya undangan, daftar hadir, notulen; (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal progres perbaikan TI; (iii) Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan TI, dapat dibuat secara periodik bulanan.
		3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)		

KRITERIA PENILAIAN			DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
		a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Bukti dukung dapat ditambahkan dengan : (i) Kebijakan KIP, yang memuat minimal: - apa saja yang perlu diketahui masyarakat, baik berupa produk BPS atau transparansi pelaksanaan pemerintahan - kapan hal-hal di atas di-update dan siapa yang berwenang - hal terkait pengaduan apabila ada keluhan dalam akses informasi (ii) Bukti foto/gambar/screenshot website atas pelaksanaan KIP yang telah berjalan	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Kebijakan KIP, yang memuat minimal: - apa saja yang perlu diketahui masyarakat, baik berupa produk BPS atau transparansi pelaksanaan pemerintahan - kapan hal-hal di atas di-update dan siapa yang berwenang - hal terkait pengaduan apabila ada keluhan dalam akses informasi (ii) Bukti foto/gambar/screenshot website atas pelaksanaan KIP yang telah berjalan.
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Belum terdapat bukti adanya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik: (i) Bukti rapat evaluasi pelaksanaan KIP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal progres perbaikan yang dilakukan, dll (iii) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIP, dapat dibuat secara periodik	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Bukti rapat evaluasi pelaksanaan KIP, misalnya undangan, daftar hadir, notulen (ii) Bukti tindak lanjut atas hasil evaluasi rapat tersebut, misal progres perbaikan yang dilakukan
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)				
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi		
		a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Agar memperbaiki bukti dukung sehingga menerangkan penerapan di BPS Kabupaten Polewali Mandar. Karena bukti dukung banyak menunjukkan penerapan di BPS Provinsi Sulawesi Barat.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar berupa Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai yang berbasis pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerjanya.
		b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	-	-
		c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Agar memperbaiki bukti monitoring dan evaluasi, karena tanggal evaluasi menunjukkan tanggal 1 April 2018 dan 1 Juli 2018, sedangkan pegawai baru yang dinilai TMT tanggal 1 Januari 2019.	Dokumen tindak lanjut telah sesuai. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar (i) Laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai (dievaluasi juga peningkatan kerjanya); (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi
	2	Pola Mutasi Internal (2)		
		a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Mutasi pegawai belum sepenuhnya menunjukkan wujud dari pengembangan karier pegawai. Bukti dukung dapat berupa : (i) Dokumen pola dasar untuk mutasi (ii) Undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan rapat mutasi internal (iii) Riwayat pendidikan/diklat/pengembangan karir lainnya untuk pegawai yang dimutasi	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar : (i) Dokumen pola dasar untuk mutasi (ii) Undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan rapat mutasi internal (iii) Riwayat pendidikan/diklat/pengembangan karir lainnya untuk pegawai yang dimutasi
		b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Bukti dukung belum menunjukkan mutasi pegawai memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi. Bukti dukung dapat ditambah dengan : (i) Dokumen pola dasar untuk mutasi (ii) Daftar pegawai dengan kompetensinya masing-masing (iii) Undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan rapat mutasi internal (iv) Riwayat pendidikan/diklat/bimtek pegawai yang akan atau telah dimutasi (v) Kertas kerja/laporan yang memuat pertimbangan unit kerja untuk melakukan mutasi internal	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Dokumen pola dasar untuk mutasi (ii) Daftar pegawai dengan kompetensinya masing-masing (iii) Undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan rapat mutasi internal (iv) Kertas kerja/laporan yang memuat pertimbangan unit kerja untuk melakukan mutasi internal
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	-	-
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)		
		a. Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi	Tidak terdapat bukti dukung terkait Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar berupa Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.
		b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Bukti dukung dapat ditambahkan dengan dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai yang berbasis pada hasil pengelolaan kinerja pegawai dan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai yang berbasis pada hasil pengelolaan kinerja pegawai (ii) Undangan, notula, daftar hadir, dan dokumentasi penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
			c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Laporan analisis kesenjangan kompetensi pegawai menunjukkan BPS Provinsi Sulawesi Barat, agar memperbaiki laporan yang menerangkan spesifik di unit kerja BPS Kabupaten Polewali Mandar.	Laporan mengenai kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan di BPS Kabupaten Polewali Mandar.
			d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Bukti dukung belum menunjukkan memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya untuk seluruh pegawai, masih terbatas pada subbag tata usaha.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Dokumen Kebijakan pengembangan kompetensi pegawai (ii) Undangan diklat/pelatihan yang lain dan usulan pengajuannya (i) Dokumen Kebijakan pengembangan kompetensi pegawai (ii) Undangan diklat/pelatihan yang lain dan usulan pengajuannya yang memberi kesempatan untuk semua pegawai.
			e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)	Bukti dukung belum menunjukkan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai, masih terbatas pada subbag tata usaha.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Dokumen Kebijakan pengembangan kompetensi untuk seluruh pegawai. (ii) Undangan diklat/pelatihan yang lain dan usulan pengajuannya (pada tahun yang relevan) (iii) Laporan pelaksanaan kegiatan training yang diselenggarakan oleh unit kerja
			f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Bukti notulen rapat tanggal 15 Juli 2019, belum menunjukkan monitoring dan evaluasi dilakukan hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja tiap bulan/triwulanan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar: (i) Laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi pegawai (dievaluasi juga peningkatan kinerjanya); (ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi
			4 Penetapan kinerja individu (4)		
			a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Bukti dukung masih terbatas Penilaian Prestasi Kerja untuk satu orang pegawai, belum menunjukkan seluruh penetapan kinerja individu pegawai. Bukti dukung dapat berupa : (i) SKP pegawai yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya (ii) IKI (iii) PK yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan	Dokumen tindak lanjut telah sesuai, penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi .
			b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Bukti dukung agar ditambah dengan: - PK Kepala unit kerja - PK Kepala seksi/subbag - IKI untuk level staf. Sehingga menunjukkan kesesuaian indikator kinerja dengan level diatasnya.	Dokumen tindak lanjut telah sesuai, ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.
			c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Bukti dukung berupa rekap SKP menunjukkan pengukuran secara tahunan. Agar mengumpulkan pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan, dapat berupa penilaian CKP sebagai dasar tunjangan kinerja.	Dokumen tindak lanjut telah sesuai, pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan.
			d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	Bukti dukung berupa piagam penghargaan belum menunjukkan hubungan/proses penilaian kinerja sebagai dasar pemberian reward.	Dokumen tindak lanjut telah sesuai, penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar berupa dokumen rapat penentuan pemberian reward pada pegawai.
			5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)		
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Bukti dukung berupa rekap KJK belum menunjukkan implementasi aturan, karena pegawai yang KJK lebih dari 5 hari belum mendapatkan hukuman disiplin sesuai aturan. Dapat menambahkan bukti berupa: (i) Peraturan disiplin/kode etik, dll (internal) (ii) Laporan pelaksanaan penerapan peraturan di atas (iii) Laporan /dokumentasi penerapan dan penegakan hukuman atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.	Bukti dukung masih terbatas pada pelaksanaan jam kerja dan pakaian jam kerja, belum terlihat implementasi keseluruhan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi. Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar (i) Peraturan disiplin/kode etik, dll (internal) (ii) Laporan pelaksanaan penerapan peraturan di atas (iii) Laporan /dokumentasi penerapan dan penegakan hukuman atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
			6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)		

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
			a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	Screenshot simpeg belum menunjukkan pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara bulanan.	Dokumen yang dapat dilengkapi sebagai perbaikan pelaksanaan ZI yang akan datang di BPS Kabupaten Polewali Mandar (i) Jadwal pemutakhiran data informasi kepegawaian (ii) Laporan pemutakhiran data informasi kepegawaian (bulanan) melalui aplikasi SIMPEG
IV. Penguatan Akuntabilitas (10)					
			1 Keterlibatan pimpinan (5)		
			a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	-	-
			b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Pimpinan belum dapat dipastikan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja karena bukti dukung yang disampaikan baru berupa PK BPS Kabupaten Polewali Mandar, tambahkan bukti dukung rapat (undangan, daftar hadir, notulen) yang melibatkan pimpinan dalam penetapan kinerja	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti keterlibatan pimpinan dalam rapat rutin setiap bulan, namun berdasar notulen yang disampaikan belum terdapat pembahasan penyusunan Penetapan Kinerja
			c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan belum dapat dipastikan memantau kinerja secara berkala karena belum dilampirkan bukti dukung yaitu berupa : - Bukti rapat monitoring/pemantauan pencapaian PK, misalnya undangan, daftar hadir, notulen (bulanan) - Laporan hasil pemantauan pencapaian PK yang disahkan pimpinan (bulanan)	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti rapat rutin setiap bulan, namun berdasar notulen yang disampaikan belum terdapat pembahasan monitoring pencapaian kinerja
			2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)		
			a. Dokumen perencanaan sudah ada	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung berupa Renstra dan Penetapan Kinerja, namun belum melengkapi bukti dukung berupa : Rencana Kerja Tahunan	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti Renstra dan Penetapan Kinerja namun untuk RKT/Renja tersedia di BPS Pusat
			b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Belum dilengkapi dengan bukti dukung berupa : Rencana Kerja Tahunan	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti Renstra dan Penetapan Kinerja namun untuk RKT/Renja tersedia di BPS Pusat
			c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Bukti dukung yang dilampirkan berupa Perka BPS no 2 tahun 2017, agar menambahkan penerapan IKU di BPS Kabupaten Polewali Mandar.	Bukti dukung yang dilampirkan sesuai Perka BPS no 2 tahun 2017
			d. Indikator kinerja telah SMART	-	-
			e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	-	-
			f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	-	-
			g. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	-	-
			h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	-	-
V. Penguatan Pengawasan (15)					
			1 Pengendalian Gratifikasi (3)		
			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign hanya berupa banner, dapat menambahkan bukti berupa : (i) Spanduk/leaflet dll tentang larangan gratifikasi (ii) Dokumen sosialisasi larangan gratifikasi dalam rapat internal maupun eksternal (undangan, notulen, daftar hadir)	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi Public Campaign yang dimiliki satker selain banner
			b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan telah melakukan pengendalian gratifikasi karena bukti dukung belum relevan, lampirkan bukti dukung berupa : - SK terkait unit pengendalian gratifikasi (UPG) - Laporan kegiatan dari tim UPG	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung SK Unit Pengendalian Gratifikasi, atau laporan kegiatan dari tim UPG
			2 Penerapan SPIP (3)		
			a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Bukti dukung berupa rapat rutin telah dilampirkan namun belum relevan, BPS Kabupaten Polewali Mandar agar melengkapi : - Dokumen sosialisasi SPIP - SK tim SPIP - Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi : - Dokumen sosialisasi SPIP - SK tim SPIP - Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP
			b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan bukti screenshot penilaian risiko namun masih sebagian dari unit kerjanya, sebaiknya agar melengkapi: - Matrik identifikasi resiko beserta penilaian resiko dari seluruh unit kerja - Dokumen peta resiko	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan bukti screenshot penilaian risiko namun masih sebagian dari unit kerjanya, namun belum melengkapi: - Matrik identifikasi resiko beserta penilaian resiko dari seluruh unit kerja dan Dokumen peta resiko

KRITERIA PENILAIAN			DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan bukti sreenshoot penilaian risiko namun masih sebagian dari unit kerjanya, sebaiknya agar melengkapi: - Matrik identifikasi resiko beserta penilaian risikonya dari seluruh unit kerja - Dokumen peta resiko	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan bukti sreenshoot penilaian risiko namun masih sebagian dari unit kerjanya, namun belum melengkapi: - Matrik identifikasi resiko beserta penilaian resiko dari seluruh unit kerja dan Dokumen peta resiko
		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI belum dapat dipastikan telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak, karena bukti dukung yang disampaikan belum relevan. BPS kabupaten Polewali Mandar agar melampirkan bukti dukung berupa : - Dokumen sosialisasi SPI, misalnya: - melalui apel pagi/sore (bukti foto dan teks arahan pimpinan terkait SPI) - melalui rapat internal (bukti undangan, daftar hadir, notulen yang memuat internalisasi SPI)	SPI belum dapat dipastikan telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak, karena belum menambahkan bukti dukung berupa : - Dokumen sosialisasi SPI, misalnya: - melalui apel pagi/sore (bukti foto dan teks arahan pimpinan terkait SPI) - melalui rapat internal (bukti undangan, daftar hadir, notulen yang memuat internalisasi SPI)
		3 Pengaduan Masyarakat (3)		
		a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan bukti dukung berupa kotak pengaduan masyarakat di ruang pelayanan namun belum dilengkapi dengan : - SK petugas Pengaduan Masyarakat	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum menyampaikan bukti dukung tambahan berupa : - SK petugas Pengaduan Masyarakat
		b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Hasil penanganan pengaduan masyarakat belum dapat dipastikan ditindaklanjuti karena bukti dukung kurang relevan, BPS kabupaten Polewali Mandar agar melengkapi : - Capture respon pengaduan masyarakat - Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait - Laporan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya secara berkala	BPS kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi : - Capture respon pengaduan masyarakat - Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait - Laporan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya secara berkala
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Belum dapat dipastikan telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat karena belum dilengkapi dengan bukti dukung. BPS Kabupaten Polewali Mandar agar melengkapi : - Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti - Laporan movev atas penanganan pengaduan masyarakat secara bulanan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung berupa : - Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti - Laporan movev atas penanganan pengaduan masyarakat secara bulanan
		d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melampirkan bukti dukung terkait evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, oleh karena itu agar melampirkan Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung terkait evaluasi penanganan pengaduan masyarakat,
		4 Whistle-Blowing System (3)		
		a. <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi	-	-
		b. <i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan WBS telah diterapkan karena belum dilampirkan bukti, agar melampirkan bukti berupa: - SK Tim/unit yang menangani WBS - Kebijakan pimpinan terkait WBS - Capture aplikasi WBS - Laporan pengelolaan WBS oleh unit terkait	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung melampirkan bukti berupa: - SK Tim/unit yang menangani WBS - Kebijakan pimpinan terkait WBS - Capture aplikasi WBS - Laporan pengelolaan WBS oleh unit terkait
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan WBS telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS karena belum dilampirkan bukti, agar melampirkan bukti berupa: -Laporan movev atas penerapan WBS secara bulanan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung berupa: -Laporan movev atas penerapan WBS secara bulanan
		d. Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan WBS telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan WBS karena belum dilampirkan bukti, agar melampirkan bukti berupa: - Dokumen laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi bulanan di atas	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung berupa: - Dokumen laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi bulanan di atas
		5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)		
		a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	-	-

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Penanganan Benturan kepentingan belum dapat dipastikan telah disosialisasikan /internalisasi karena belum dilengkapi dengan bukti dukung, oleh karena itu agar dilengkapi bukti dukung berupa : - Dokumen dan capture internalisasi penanganan benturan kepentingan, antara lain: - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto - bimtek (laporan, foto) - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan) - dll	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi i bukti dukung berupa : - Dokumen dan capture internalisasi penanganan benturan kepentingan, antara lain: - rapat (undangan, daftar hadir, notulen, foto - bimtek (laporan, foto) - apel pagi/sore (foto, teks arahan pimpinan) - dll
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Penanganan Benturan kepentingan belum pasti telah diimplementasikan karena bukti dukung disampaikan tidak relevan, oelh karena itu agar dilengkapi bukti dukung berupa : - SK Tim/unit yang menangani Penanganan Benturan Kepentingan - Kebijakan pimpinan terkait Penanganan Benturan Kepentingan - Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung berupa : - SK Tim/unit yang menangani Penanganan Benturan Kepentingan - Kebijakan pimpinan terkait Penanganan Benturan Kepentingan - Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, oleh karena itu agar mengirimkan bukti dukung berupa : - Laporan movev atas penanganan benturan kepentingan secara berkala	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung berupa : - Laporan movev atas penanganan benturan kepentingan secara berkala
		e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan telah melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan karena bukti dukung tidak relevan, oleh karena itu agar mengirimkan bukti dukung berupa : Dokumen laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi berkala di atas	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung berupa : Dokumen laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi berkala di atas
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)					
		1	Standar Pelayanan (3)		
		a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan terdapat kebijakan standar pelayanan karena bukti dukung disampaikan belum relevan, oleh karena itu agar menyampaikan bukti dukung berupa: - Dokumen standar pelayanan di BPS Kabupaten Polewali Mandar	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung SOP sebagai standar pelayanan
		b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan	Standar pelayanandi BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan telah memaklumkan standar pelayanan karean bukti dukung yang dilampirkan belum relevan, oleh karena itu agar menyampaikan bukti berupa : - Dokumen maklumat standar pelayanan - Capture maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah menyampaikan bukti dukung berupa : - Dokumen maklumat standar pelayanan - Capture maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan
		c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP standar pelayanan di BPS Kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan ada karena bukti dukung yang terlampir belum relevan, oleh karena itu agar melampirkan bukti dukung berupa : - SOP pelaksanaan pelayanan - Capture pelaksanaan pelayanan yang ada dan sesuai SOP	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung SOP sebagai standar pelayanan
		d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	BPS kabupaten Polewali Mandar belum dapat dipastikan telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP karena bukti dukung terlampir belum relevan, oleh karena itu agar disampaikan beukti dukung berupa : - Dokumen reviu standar pelayanan dan SOP - Dokumen tindak lanjut atas reviu berupa perbaikan standar pelayanan dan SOP	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum melengkapi bukti dukung berupa : - Dokumen reviu standar pelayanan dan SOP - Dokumen tindak lanjut atas reviu berupa perbaikan standar pelayanan dan SOP
		2	Budaya Pelayanan Prima (3)		
		a.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	-	-
		b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	-	-
		c.	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Belum terdapat implementasi kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung : - Penghargaan Petugas Pelayanan Terbaik Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 dan SK Nya - SK Petugas PST BPS Kab Polewali Mandar
		d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Belum seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu.	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung pelayanan terpadu

KRITERIA PENILAIAN				DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI	Catatan Tindak Lanjut
			e. Terdapat inovasi pelayanan	BPS Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti inovasi pelayanan
		3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)		
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan karena bukti dukung telah menyampaikan buku pedoman dan kuesioner terkait survey kebutuhan data tahun 2018, namun belum menyampaikan buku pedoman dan kuesioner tahun 2019 dan Dokumen laporan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung Survei Kepuasan Data
			b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Bukti dukung hasil kepuasan masyarakat tahun 2019 belum dapat dipastikan dapat diakses secara terbuka karena bukti dukung yang disampaikan adalah tahun 2017 sehingga kurang relevan, oleh karena itu agar disampaikan bukti dukung berupa : - Capture media informasi pengumuman hasil survei tahun 2019	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung akses hasil Survei Kepuasan Data
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat belum dapat dipastikan dilakukan karena bukti belum relevan, oleh karena itu agar disampaikan dokumen berupa : - Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat	BPS Kabupaten Polewali Mandar telah melengkapi bukti dukung tindak lanjut Survei Kepuasan Data